

**PENGARUH PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN UMKM
DENGAN VARIABEL INTERVENING KOMPETENSI SDM PADA
PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN BULUNGAN**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Jamilatul Lail (202241010)**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KALTARA
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, dan dikategorikan berdasarkan kriteria aset atau modal serta omzet penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta UMKM beroperasi di Indonesia dan menjadi penggerak utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Keberadaan UMKM harus tetap dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat pedesaan, bahwa usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran, jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi daerah (Choiri Rizal, 2020 dalam Rahmah Itsnaini et al 2020).

Dalam kondisi persaingan UMKM yang semakin ketat, pendapatan menjadi indikator utama yang menunjukkan kemampuan usaha dalam bertahan, berkembang, dan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Menurut Jan R. William, Susan F. Haka, Mark S. Bettner R. Meigs (2002:54) dalam Ridho Akbar (2022:22) pendapatan ialah suatu hasil dari proses jual beli baik itu berupa barang maupun

jasa yang didapatkan dalam suatu periode akuntansi. Pendapatan tidak hanya mencerminkan hasil penjualan, namun juga efektivitas strategi usaha dan kualitas pengelolaan yang dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan UMKM, peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat di daerah (Sumadi, 2021) dalam Anto et al (2023). Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pasal 1 dinyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Pemerintah berperan melalui penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM, pembinaan dan pengembangan usaha kecil seperti produksi, pemasaran, SDM, dan teknologi, serta sebagai fasilitasi akses peminjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM (Pramaishella, 2017).

Dukungan pemerintah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga UMKM dapat berkembang dan meningkatkan pendapatannya melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan UMKM. Bentuk peran pemerintah tersebut diwujudkan melalui pelatihan & pengembangan, kebijakan & regulasi, serta bantuan modal. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sehingga mampu mengelola usaha secara lebih efektif dan berdaya saing. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan UMKM belum terjadi secara merata, meskipun berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Bulungan, ditemukan bahwa 70% pelaku UMKM mampu meningkatkan pendapatannya setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan usaha, sementara sebagian lainnya masih mengalami pendapatan yang tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan hasil yang diperoleh pelaku UMKM dalam merespons dan memanfaatkan peran pemerintah yang telah diberikan.

Selain itu, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait program pelatihan, pendampingan, maupun bantuan dari pemerintah. Ketidakterjangkauan informasi tersebut menyebabkan tidak semua pelaku UMKM dapat merasakan manfaat dari program pemberdayaan secara optimal. Di sisi lain, terdapat pula pelaku UMKM yang meskipun belum mengikuti program pemerintah secara formal, namun menunjukkan inisiatif untuk meningkatkan kemampuan usahanya secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Perbedaan kondisi tersebut mengarah pada pentingnya faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM.. Efektivitas peran pemerintah sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM pelaku UMKM sebagai pihak yang menjalankan dan mengelola usaha. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Pelaku UMKM yang memiliki kompetensi SDM yang lebih baik cenderung mampu mengelola usaha secara lebih terencana, menjaga kualitas produk, serta menyesuaikan strategi penjualan dengan kebutuhan konsumen. Kondisi tersebut memungkinkan pelaku

UMKM untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan pendapatan usaha. Dengan demikian, kompetensi SDM diduga memiliki peran penting sebagai variabel yang memediasi hubungan antara peran pemerintah dan peningkatan pendapatan UMKM..

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dengan Variabel Intervening Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pelaku Usaha Mikro Makanan Kemasan di Kabupaten Bulungan.”** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh peran pemerintah sebagai variabel independen terhadap pendapatan UMKM sebagai variabel dependen, baik secara langsung maupun melalui kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel intervening. Kompetensi SDM diposisikan sebagai faktor yang berperan dalam memperkuat efektivitas peran pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel dalam upaya peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Bulungan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Seberapa besar peran pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan UMKM di kabupaten Bulungan?
- b. Seberapa besar peran kompetensi SDM berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan UMKM di kabupaten Bulungan?
- c. Seberapa besar peran pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kompetensi SDM di kabupaten Bulungan?

- d. Seberapa besar peran pemerintah berpengaruh secara tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan UMKM melalui variabel intervening kompetensi SDM pada pelaku UMKM di kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di kabupaten Bulungan.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar peran kompetensi SDM berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan usaha mikro di kabupaten Bulungan.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kompetensi SDM pelaku usaha mikro di kabupaten Bulungan.
- d. Untuk mengetahui Seberapa besar peran pemerintah berpengaruh secara tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro melalui variabel intervening kompetensi SDM pada pelaku usaha mikro di kabupaten Bulungan di kabupaten Bulungan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar pembahasan penelitian lebih terarah dan tidak meluas dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini difokuskan pada pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Bulungan. Usaha mikro yang dimaksud adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan usaha mikro. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro serta keterkaitannya dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendapatan usaha mikro. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara peran pemerintah, kompetensi SDM, dan pendapatan usaha mikro.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta program pemberdayaan usaha mikro, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha mikro agar lebih efektif dalam mendorong peningkatan pendapatan usaha.

2) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kompetensi SDM, baik dalam aspek manajerial, pemasaran, produksi, maupun pengelolaan usaha, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha.

3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, terutama terkait peran pemerintah dan kompetensi SDM dalam pengembangan usaha mikro.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut Hasibuan (2016:10) dalam Rachmadani (2018:19) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Henry Simamora dalam Fachrurazi et al (2021:6) MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi system perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus

Menurut Bashir Barthos (1990: 1) dalam Almasri (2016), manajemen SDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber-sumber daya manusia, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas manajemen sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai Ilmu dan seni dalam mengelola tenaga kerja secara menyeluruh yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pemanfaatan, pemberian kompensasi, evaluasi, serta perlindungan terhadap sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan

kerja yang efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan bersama antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

2.1.2 Tujuan MSDM

Menurut Henry Simamora dalam Fachrurazi et al (2021:21) tujuan manajemen SDM dapat dibedakan menjadi empat bagian diantaranya:

a. Tujuan Sosial

MSDM bertujuan agar bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap organisasi.

b. Tujuan Organisasional

Manajemen sumber daya manusia berkewajiban meningkatkan efektifitas organisasional dengan cara meningkatkan produktivitas, mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif, mengembangkan dan mempertahankan kualitas kehidupan kerja, mengelola perubahan dan mengkomunikasikan kebijakan.

c. Tujuan Fungsional

MSDM bertujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen SDM pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

d. Tujuan Pribadi

MSDM berperan serta untuk mencapai tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi. Oleh karena itu, aktivitas SDM yang dibentuk oleh pihak manajemen harus terfokus pada pencapaian keharmonisan antara pengetahuan, kemampuan, kebutuhan

dan minat karyawan dengan persyaratan pekerjaan dan imbalan yang ditawarkan oleh manajemen sebuah organisasi.

2.1.3 Fungsi MSDM

Menurut Hasibuan dalam Christina (2023) fungsi MSDM meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.

c. Pengarahan

Pengarahan (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan.

d. Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

e. Pengadaan

Pengadaan (*procurement/recruitment*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induk untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

f. Pengembangan

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan

dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.

g. Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

h. Pengintergrasian

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

i. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

j. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

k. Pemberhentian

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

2.2 Peran Pemerintah

2.2.1 Pengertian Peran Pemerintah

Menurut Soerjono Soekanto dalam Imanuel (2023), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran dapat juga dikatakan seperti sebuah seni karena merupakan sebuah kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya yang bersangkutan dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran sebagai seniman (Damsar: 2016) dalam Nartin, N., & Musin, Y. (2022)

Menurut Soekanto (2002), Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep peran meliputi tiga dimensi utama. Pertama berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap perilaku individu sesuai dengan posisi dan status yang dimilikinya. Kedua merujuk pada seperangkat konsep atau tindakan yang dijalankan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kedudukannya. Sementara itu, Ketiga

berkaitan dengan perilaku individu yang memiliki pengaruh penting terhadap keberlangsungan dan struktur sosial masyarakat.

Berlandaskan pemahaman tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah, maka peran dapat dimaknai sebagai berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu peran yang bersifat lemah dan peran yang bersifat kuat.

2.2.2 Fungsi-fungsi Peran Pemerintah

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pada sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan;
- c. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan-peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (expected roles); cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secepat-cepat dan peranan ini tidak dapat Dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protikoler diplomatik, dan sebagainya.
- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles); yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan

mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2.2.3 Indikator Peran Pemerintah

Menurut teori Gade Diva (2009) dalam Nartin,N & Musin, Y (2022) indikator peran pemerintah meliputi:

- a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas dan sarana yang diperlukan masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar masyarakat mampu mendapat akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan seperti pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan, subsidi, dan kemudahan lainnya, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi masyarakat tidak menjadi tergantung pada bantuan pemerintah. Melalui peran ini, pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasional.
- b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator; Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi dan sosialnya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan tetap kondusif untuk melakukan investasi dan aktivitas produktif yang dilakukan dengan mengatur berbagai instrumen seperti suku bunga, kebijakan fiskal, membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha, standar operasional, perizinan, dan regulasi lainnya yang menjamin ketertiban dan keadilan bagi seluruh pihak.
- c. peran pemerintah sebagai Katalisator; Fungsi terakhir dari pemerintah adalah sebagai katalisator yaitu mempercepat terjadinya pertumbuhan dan

perkembangan masyarakat serta mendorong perubahan positif. Sebagai katalisator, pemerintah berperan dalam menstimulasi inovasi, transformasi sosial, dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah seperti pemberian penghargaan dan insentif, pemberdayaan komunitas kreatif, penyediaan modal ventura atau modal bergulir, serta pengembangan prasarana intelektual tanpa harus mengendalikan keseluruhan proses perubahan tersebut

Menurut Suwandi (dalam Imelda Ariska, 2018) ada 2 indikator penentu peran pemerintah yaitu:

- a. Memberikan pelatihan/pembinaan, merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumberdaya manusia agar lebih baik sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba peringatan hari besar dan lain-lain.
- b. Pemberian bantuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dengan meningkatnya pendapatan, maka efek ekonominya diharapkan juga akan menurunkan angka kemiskinan. Bantuan-bantuan yang diberikan dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.3 Kompetensi SDM

2.3.1 Pengertian Kompetensi SDM

Menurut Edison (2016), kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan sikap (attitude).

Wibowo (2017) mengatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut

Menurut (Spencer & M. Spencer, 1993) Kompetensi didefinisikan sebagai *Underlying characteristics of an individual which is causally related to criterionreferenced effective and or superior performance in a job or situation.* Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Kompetensi SDM adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi SDM bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku pegawai. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. (Albunsiyary et al. 2020).

Menurut Suwandi (2016) dalam Prayogi et al (2019) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Dari pendapatan diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM adalah karakteristik mendasar yang melekat pada individu, berupa kombinasi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude), yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas secara efektif dan unggul sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.

2.3.2 Komponen Kompetensi SDM

Menurut Adi Sutrisno dalam Sitompul, I (2021) komponen kompetensi diantaranya:

- a. Motives adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya.
- b. Traits adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku dan bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya, percaya diri, kontrol diri, stres atau ketabahan.
- c. Self concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang atau sikap karyawan terhadap persepsi seorang terhadap perilaku dirinya. Sehingga karyawan akan melakukan evaluasi terhadap citranya tersebut.
- d. Knowledge adalah pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.
- e. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Misalnya, operator komputer adalah keterampilan yang dapat dipelajari serta dipraktekkan. Keahlian ini juga dapat dipelajari dengan mengikuti keterampilan komputer, dan akan meningkat lagi ketika keterampilan itu dipraktekkan. Pengembangan khusus yang berkaitan dengan

kompetensi membawa dampak didalam lingkungan kerja dan kompetensi setiap karyawan.

2.3.3 Indikator Kompetensi SDM

Kompetensi sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan. Terdapat indikator kompetensi, (Thoha et al., 2008) antara lain:

- a. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi :
 - 1) Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab dalam bekerja.
 - 2) Mengetahui tugas pokok dan fungsi organisasi instansi.
 - 3) Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan teknik yang tepat dan benar.
- b. Keterampilan individu, meliputi :
 - 1) Kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik.
 - 2) Kemampuan dalam mengatasi masalah.
 - 3) Kemampuan menentukan prioritas masalah.
 - 4) Kemampuan memberikan informasi pelayanan
- c. Sikap kerja, meliputi :
 - 1) Mempunyai kreativitas dalam bekerja
 - 2) Adanya semangat kerja yang tinggi
 - 3) Mempunyai kemampuan dalam perencanaan/pengorganisasian

2.4 Pendapatan

2.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan yang didapat individu dari kinerja maupun kompetensinya dalam bekerja pada waktu tertentu seperti sehari, seminggu, sebulan sampai dengan tahunan.

Menurut KBBI tahun pendapatan diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena pekerjaan atau usaha yang sudah dilakukan.

Menurut Antonio.M.S (2010:24) Pendapatan adalah suatu peningkatan ataupun penurunan suatu aset pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari kegiatan investasi, perniagaan, penyediaan jasa ataupun aktifitas lain yang tujuannya adalah untuk memperoleh profit atau laba.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah Hasil atau penerimaan yang diperoleh individu atau entitas dari aktivitas kerja, usaha, atau pemanfaatan kompetensi dalam periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan, atau tahunan), yang dapat berupa peningkatan atau penurunan aset sebagai akibat dari kegiatan produktif seperti bekerja, berinvestasi, berdagang, atau menyediakan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2.4.2 Jenis Pendapatan

Menurut Mardiasmo (2008) dalam Ramadhan. A, et al (2023:7) yang termasuk pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan atau penggantian, yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk dalam hal ini adalah gaji, upah, honor, bonus, komisi, pensiunan, dan lain sebagainya.
- b. Hadiah, yang berupa uang atau barang yang asalnya dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain sebagainya.
- c. Laba usaha, adalah pendapatan yang diperoleh dari selisih penjualan barang dengan biaya pengeluaran untuk membuat barang, dimana yang

dimaksud seperti: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain sebagainya.

- d. Keuntungan karena penjualan, merupakan pendapatan yang berasal dari selisih penjualan barang dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, seperti: biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya.
- e. Pembayaran pajak yang diterima Kembali yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam menghitung pajak yang dilakukan.
- f. Bunga dari pengembalian utang kredit. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengembalian piutang yang lebih dari jumlah uang yang telah dipinjamkan kepada orang lain.
- g. Devide atau pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini merupakan laba yang dibagi atau koperasi yang setara dengan modal yang ditanamkan.
- h. Royalti, adalah pendapatan yang diperoleh dari balas jasa yang diterima terhadap hak cipta yang dipakai oleh orang lain.
- i. Sewa, adalah pemindahan hak guna dari hak milik untuk orang lain pada periode yang telah ditentukan

2.4.3 Sumber Pendapatan

Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Ramadhan. A, et al (2023:9) mengemukakan bahwa pendapatan juga bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari hasil usaha sendiri.

Pendapatan usaha sendiri adalah nilai keseluruhan dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan juga ini merupakan usaha milik sendiri ataupun milik keluarga sendiri seperti menjual produk, onlineshop, pedagang, buruh, dan lain-lain.

b. Pendapatan dari usaha lain.

Pendapatan ini dihasilkan tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini juga merupakan pendapatan sampingan, dimana pendapatan yang didapat dari hasil menyewakan asset, bunga dari uang, sumbangan dari orang lain, pendapatan dari hasil pension, dan lain sebagainya.

Pendapatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendanai segala pengeluaran dan kegiatan. Konsep pendapatan dapat digunakan untuk mengukur kondisi seseorang yang menunjukkan jumlah total uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu.

c. Pendapatan masyarakat.

Pendapatan masyarakat merupakan arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah, gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan (personal income) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dan pembayaran transfer. Pendapatan masyarakat baik meningkat maupun menurun yang dimana secara nyata berhubungan erat dengan kebutuhan hidup dalam pemenuhannya.

2.4.4 Indikator Pendapatan

Menurut Soediyono (2011) dalam Siahaan (2024) untuk mengetahui tingkat pendapatan seseorang atau perusahaan dapat diukur menggunakan indikator yaitu:

- a. Pendapatan yang diterima perusahaan harus memberikan keuntungan sehingga perusahaan dapat menutupi semua kewajiban dan meningkatkan usahanya.
- b. Pendapatan yang diterima dari operasional perusahaan harus memenuhi kepuasan hati para pemilik perusahaan.
- c. Pendapatan tersebut harus dapat membalas jasa dan pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan, misalnya dapat membayar gaji karyawan.

Menurut Danang (2017) dalam Gojali (2023), beberapa indikator pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghasilan atau omset penjualan, penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu.
- b. Laba usaha, laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi.

Berdasarkan paparan di atas, maka indikator peningkatan pendapatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Danang yaitu penghasilan dan laba usaha.

2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang ber skala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM, telah menetapkan kriteria UMKM berdasarkan Undang – Undang No. 20 tahun 2008.

Kriteria ini mencakup tiga klasifikasi berdasarkan skala bisnis :

a. Usaha Mikro (UM):

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil (UK):

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Usaha Menengah (UM):

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.6 Penelitian Terdahulu

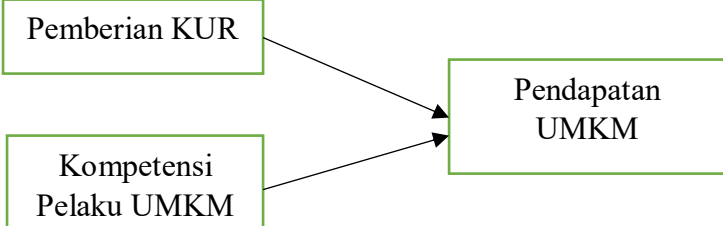
Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian
Itsnaini Rahmah, M. Elfan Kaukab, Wiji Yuwono

Nama Peneliti	Itsnaini Rahmah, M. Elfan Kaukab, Wiji Yuwono
Tahun dan Judul Jurnal	(2020) “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm”
Model	<p style="text-align: center;">Gambar 1 Model Penelitian</p> <pre> graph LR M1[Modal x1] -- H1 (+) --> Y[Tingkat Pendapatan y] L2[Lokasi usaha x2] -- H2 (+) --> Y T3[Teknologi x3] -- H3 (+) --> Y P[Peran Pemerintah m] -- H4 --> M1_Y P -- H5 --> L2_Y P -- H6 --> T3_Y style M1_Y fill:none,stroke:none style L2_Y fill:none,stroke:none style T3_Y fill:none,stroke:none </pre>
Hasil Penelitian	Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan modal, lokasi usaha dan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan peran pemerintah dapat memoderasi pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo namun tidak dapat memoderasi pengaruh lokasi usaha, dan teknologi terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo.
Populasi dan Sampe	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 60.592 UMKM berdasarkan data dari LKjIP Kabupaten Wonosobo, 2018. Jumlah

	sampel berdasarkan perhitungan rumus Slovin adalah 100, namun dalam penelitian ini peneliti menyebar kuesioner kepada 130 pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo
Alat Analisis	SEM
Yang dirujuk dari penelitian ini	Peran Pemerintah, Pendapatan

Tabel 2.2**Hasil Penelitian****Cecilia Lelly Kewo, Melisa elfira Akay**

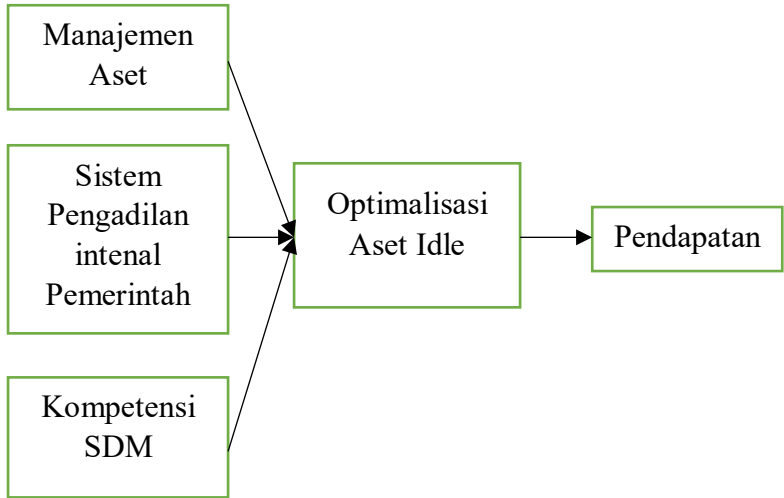
Nama Peneliti	Cecilia Lelly Kewo, Melisa elfira Akay
Tahun dan Judul Jurnal	(2024) “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat dan Kompetensi Pelaku UMKM Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara”
Model	 <pre> graph LR A[Pemberian KUR] --> D[Pendapatan UMKM] B[Kompetensi Pelaku UMKM] --> D </pre>
Hasil Penelitian	Hasil pengujian melalui analisis regresi berganda, baik melalui uji F untuk uji simultan maupun melalui uji t untuk uji parsial untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat terbukti memberikan hasil yang signifikan. Nilai Fhitung pada uji simultan terbukti lebih besar dari Ftabel ($35,6 > 3,1950$), artinya faktor KUR dan Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM. Secara parsial, nilai thitung masing-

	<p>masing lebih besar dari ttabel; untuk X1 terhadap Y sebesar 2,943 > 2,0117), dan X2 terhadap Y sebesar 2,757 > 2,0117. Artinya masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Begitu pula berdasarkan angka koefisien determinan R Square sebesar 0,603, hal ini berarti faktor pendapatan UMKM sebesar 60,3% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor pemberian KUR dan kompetensi pelaku UMKM. Baik pengujian secara parsial maupun simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pemberian KUR dan kompetensi pelaku UMKM berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Tombatu – Kabupaten Minahasa Tenggara.</p>
Populasi dan Sampel	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Tombatu – Kabupaten Minahasa Tenggara. Teknik Sampling yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini adalah <i>Teknik Purposive Sampling (Teknik Non Probability Sampling)</i>, yakni satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki, sehingga besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan sebesar 50 pelaku UMKM, jadi $n = 50$.</p>
Alat Analisis	SPSS
Yang dirujuk dari penelitian ini	Pemberian KUR, Kompetensi Pelaku UMKM, Pendapatan Pelaku Usaha UMKM

Tabel 2.3

Hasil Penelitian

Aan Kurniyanta, Ahmad roziq, R. Andi Sularso

Nama Peneliti	Aan Kurniyanta, Ahmad roziq, R. Andi Sularso
Tahun dan Judul Jurnal	2018. Analisis Pengaruh Manajemen Aset, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Dengan Optimalisasi Aset Idle Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Kpknl Jember)
Model	 <pre> graph LR MA[Manajemen Aset] --> OAI[Optimalisasi Aset Idle] SPIP[Sistem Pengadilan intenal Pemerintah] --> OAI KSDM[Kompetensi SDM] --> OAI OAI --> P[Pendapatan] </pre>
Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset idle. Manajemen aset dan optimalisasi aset idle tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan. Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan. Hasil analisis kualitatif deskriptif menyimpulkan bahwa masih banyak satuan kerja yang belum optimal dalam pengelolaan aset karena mengalami kendala dalam pemanfaatan asetnya</p>
Populasi dan Sampel	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja K/L di wilayah kerja KPKNL Jember sejumlah 210 satuan kerja.

	Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan 61 sampel
Alat Analisis	aplikasi SmartPLS 3.0 & analisis deskriptif
Yang dirujuk dari penelitian ini	Kompetensi SDM, Pendapatan

2.7 Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Variabel Peran Pemerintah Terhadap Pendapatan UMKM

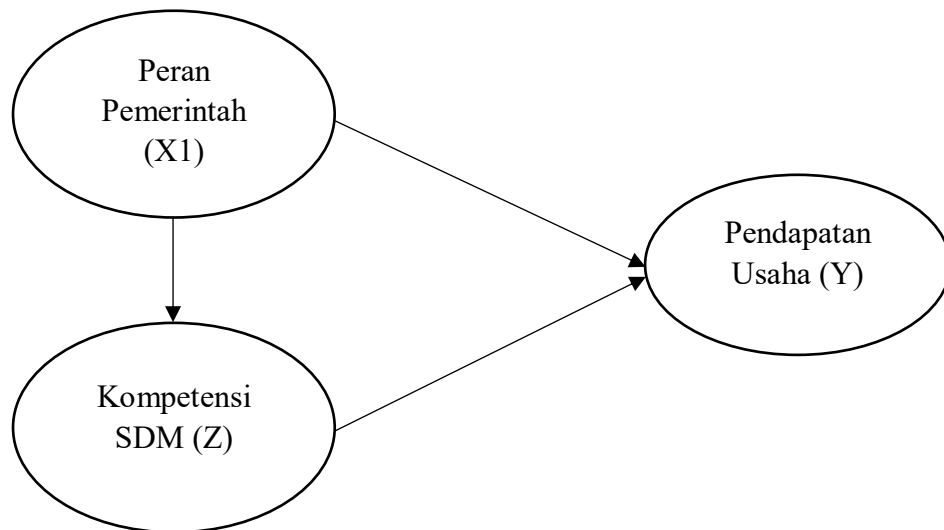
Peran pemerintah yang efektif melalui program-program pemberdayaan dapat secara langsung meningkatkan pendapatan UMKM. Berbagai program yang diselenggarakan pemerintah dirancang untuk memberikan dukungan langsung yang dapat meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan.

H1: Diduga Peran Pemerintah Berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan UMKM

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir penelitian merupakan keterkaitan antara fenomena, teori, penelitian terdahulu, variabel yang diteliti, alat Analisa, hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana teori-teori dan hipotesis yang menghubungkan antara variabel bebas guna mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan seperti dalam kerangka berikut ini:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dan mengetahui hubungan pengaruh antar variabel yang dibangun dalam model penelitian.

Langkah-langkah proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti diawali dengan penelitian awal untuk menyelidiki permasalahan yang ada pada objek penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan studi pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya dan hasil penelitian empiris yang menjadi dasar untuk membangun model penelitian. Ini diikuti oleh observasi dan wawancara di tempat, pengumpulan data primer menggunakan survei yaitu tentang pengaruh peran pemerintah terhadap pendapatan UMKM dengan kompetensi SDM sebagai variabel intervening. Dimana penelitian ini mencoba untuk melihat seberapa pengaruhnya peran pemerintah terhadap pendapatan UMKM dengan kompetensi SDM sebagai variabel intervening di kabupaten Bulungan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bulungan khususnya kepada para pelaku usaha Mikro UMKM.

Adapun pelaksanaan penelitian skripsi ini direncanakan dalam tabel sebagai berikut:

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro di kabupaten Bulungan yaitu berjumlah pelaku usaha.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Angket (Questionnaire) angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian pada tiap jawaban pertanyaan mempunyai makna dalam menguji hipotesis.
- b. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang dianggap perlu dan berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.
- c. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan literatur dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini

3.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui bahwa mekanisme penelitian berjalan optimal, setiap variabel harus didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tepat. Definisi fungsional variabel merupakan hasil pemetaan kerangka acuan konseptual yang dibangun menjadi konsep fungsional mulai dari variabel, dimensi, indikator, dan skala pengukuran serta sumber referensi. Setelah definisi operasional dijelaskan dengan jelas, itu harus dimasukkan dalam tabel definisi operasional variabel untuk menjelaskan pemetaan.

3.6 Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diberikan menjadi dua jenis, menurut Tontowi (2019) yaitu:

3.6.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, artikel dan lain-lain.

3.7 Instrumen penelitian

Menurut Tontowi (2019), Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai penggambaran variabel untuk pembuktian hipotesis. Kesalahan menggunakan alat ukur akan berakibat kesalahan dalam menilai atau menginterpretasi sebuah fakta empiris. Alat ukur dalam penelitian manajemen seringkali bersifat kontigensi, yaitu sangat tergantung dari fenomena sosial yang terus berubah dan situasi dan kondisinya relatif bisa berbeda-beda di setiap tempat penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada setiap pertanyaan apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$) maka instrument itu dianggap tidak valid dan jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka instrument dianggap tidak valid.

Validitas menurut Sugiyono (2020) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2020) uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang tidak reliabel, tidak dapat diproses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang biasa. Suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil-hasil yang konsisten dari waktu ke waktu.

Reliabilitas instrumen diuji dengan alat analisis Alpha Cronbach, jika nilai koefisien Alpha Cronbach di atas 0,60, mengindikasikan instrumen tersebut reliabel. Sebaliknya jika nilai koefisien Alpha Cronbach di bawah 0,60, mengindikasikan instrumen tidak reliabel. (Tontowi, 2019).

3.8 Metode Analisis Data

Ada dua metode statistik yang biasa digunakan dalam penelitian manajemen, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah gambaran data lapangan dengan cara mempresentasikan data primer ke dalam tabulasi. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang variabel-variabel yang diteliti dan juga untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing variabel dalam bentuk frekuensi dan persentase, serta untuk memperoleh gambaran umum tentang karakteristik dari responden pada objek penelitian (Tantowi, 2019). Analisis statistik inferensial memfokuskan pada bidang kajian analisis dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan data sampel yang diperoleh. Metode statistik inferensial yang digunakan dalam analisis data pada pembahasan ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). Alasan menggunakan SEM, variabelnya tidak hanya terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat

(dependent variable), akan tetapi ada variabel antara (intervening variable) atau ada variabel moderator (moderating variable). Pertimbangan bahwa hubungan kausal yang dirumuskan dalam banyak penelitian dengan pendekatan kuantitatif, banyak menggunakan model yang tidak sederhana (kompleks). Bentuk hubungan kausal seperti ini membutuhkan analisis yang mampu menjelaskan secara simultan tentang hubungan tersebut sehingga metode yang digunakan dalam analisis data direkomendasikan menggunakan SEM. (Tontowi, 2019).

Pada pembahasan ini menggunakan analisis *Struktural Equation Modeling* (SEM) berdasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut. Alasan pertama, pembahasannya untuk menguji model secara struktural. Alasan kedua yaitu pada pembahasan ini diasumsikan seluruh variabel melibatkan variabel yang bersifat *unobservable (latent variable)*, yaitu variabel tidak dapat diukur secara langsung melalui indikator, sehingga harus dilakukan teknik analisis *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Akan tetapi dalam *Struktural Equation Modeling* (SEM) dapat dilakukan teknik yang identik dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yaitu *Struktural Equation Modeling* (SEM) dalam model pengukuran.

Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran. persamaan yang didapat dari diagram alur yang dikonversi terdiri dari (Tontowi, 2016):

- a. Persamaan struktural (*structural equation*), yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk.

Persamaan struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman berikut ini:

$\text{variabel endogen} = \text{variabel eksogen} + \text{variabel endogen} + \text{error}$
--

- b. Persamaan spesifik model pengukuran (*measurement model*), dimana harus ditentukan variabel yang mengukur konstruk dan menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang dihipotesakan antar konstruk. Persamaan struktural yang akan dicari dan diuji koefisiennya adalah sebagai berikut:

$$Y = g X + z$$

$$Y1 = g1 X1 + z1$$

$$Y2 = g2 X1 + z2$$

Keterangan:

g (Gama) = Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

b (Beta) = koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen

z (Zeta) = galat model

- c. Evaluasi Kriteria *Goodness of Fit* Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telah terhadap berbagai kriteria *goodness of fit*. Berikut ini beberapa indeks kesesuaian dan *cut-off value* untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak (Tontowi, 2016).
- d. χ^2 -Chi-square statistik, dimana model dipandang baik atau memuaskan bila nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai χ^2 semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas dengan *cut-off value* sebesar $p > 0.05$ atau $p > 0.10$
- e. RMSEA (*The root Mean Square Error of Approximation*), yang menunjukkan *goodness of fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi (Hair dalam Tontowi, 2016). Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah *close fit* dari model itu berdasarkan *degrees of freedom*.

- f. GFI (*Goodness of Fit Index*), adalah ukuran non statistik yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1.0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah '*better fit*'.
- g. AGFI (*Adjusted Goodness of Fit Index*), dimana tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90.
- h. CMIN/DF, adalah *The Minimum Sample Discrepancy Function* yang dibagi dengan *Degree of Freedom*. CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi-square, χ^2 dibagi DFnya disebut χ^2 relatif. Bila nilai χ^2 relatif kurang dari 2.0 atau 3.0 adalah indikasi dari *acceptable fit* antara model dan data.
- i. TLI (*Tucker Lewis Index*), merupakan *incremental index* yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah base line model, dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah $\geq 0,95$ dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan *a very good fit*.
- j. CFI (*Comparative Fit Index*), dimana bila mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi (Arbuckle dalam Tontowi, 2016). Nilai yang direkomendasikan adalah $CFI \geq 0,95$.

Dengan demikian indeks-indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model adalah seperti dalam tabel ini

3.9 Pengujian Asumsi Model Structural Equation Modeling (SEM)

Prinsip uji hipotesis asumsi model, yaitu asumsi yang berkaitan dengan model dan asumsi yang berkaitan dengan pendugaan parameter dan pengujian hipotesis yang dijelaskan berikut (Tontowi, 2016):

- a. Asumsi linearitas yaitu asumsi yang menghendaki semua hubungan berbentuk linier. Uji linearitas, untuk memeriksanya dapat dilakukan dengan membuat

diagram pencar (*scatter diagram*) atau pendekatan *curve fit* (pada *software* SPSS). Pengujian asumsi linearitas menggunakan metode *curve fit* yang dilakukan dengan *software* SPSS. 49 Rujukan yang digunakan adalah jika nilai Sig model Linear < 0.05 maka asumsi linearitas terpenuhi.

b. Asumsi tidak adanya *outlier* (pencilan). *Outlier* merupakan observasi yang muncul dengan nilai ekstrim secara *univariate* maupun *multivariate* karena kombinasi karakteristik unik dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi lainnya. *Outlier* muncul dengan empat (4) kategori berikut:

1. *Outlier* muncul karena kesalahan prosedur seperti kesalahan dalam memasukkan data atau kesalahan dalam mengkode data.
2. *Outlier* muncul karena keadaan khusus yang memungkinkan profil data menjadi lain, khusus yang memungkinkan profil data menjadi lain, tetapi peneliti mempunyai penjelasan mengenai apa yang menyebabkan munculnya nilai ekstrim tersebut.
3. *Outlier* muncul karena adanya suatu alasan, tetapi tidak dapat diketahui perihal penyebab munculnya ekstrim itu
4. *Outlier* muncul dalam rentang nilai yang ada, tetapi apabila dikombinasikan dengan variabel lainnya, kombinasinya menjadi tidak lazim atau sangat ekstrim, yang disebut dengan *multivariate outlier*, maka menggunakan metode pengujian *Mahalanobisdistance*.

c. Asumsi normalitas sebaran, yaitu data yang akan dianalisis (*variabellatent*) dengan menyebar normal (normal ganda). Dengan sampel yang besar (100), asumsi ini tidak terlalu kritis, landasannya adalah Dalil Limit Pusat (*Central Limit Theorm*), yaitu jika n (*sample 50 size*) besar maka statistik dari sampel

tersebut akan mendekati distribusi normal walaupun populasi dari mana sampel tersebut diambil tidak terdistribusi normal.

3.10 Pengujian Model Stuktural: Uji Hipotesis Penelitian

Setelah model tersebut memenuhi syarat, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah uji *regression weight/loading* faktor. Uji ini dilakukan sama dengan uji t terhadap *regression weight / loading* faktor atau koefisien model (Tantowi, 2016).

Pengujian ini dilakukan terhadap:

- a. Hipótesis mengenai *measurement* model:

Parameter Lambda (λ), yaitu parameter yang berkenaan dengan pengukuran variabel *latent* berdasarkan variabel *manifest* (berkaitan dengan validitas instrumen).

Hipotesis yang diuji:

H0: $\lambda_i = 0$ (tidak signifikan)

H1: $\lambda_i > 0$ (signifikan)

- b.